

PELUANG DAN TANTANGAN DIBUKANYA BORDER ARUK DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI

Iva Ashari Ananda & Iwan Kusnadi

Abstrak

Resmi dibukanya Border yaitu Post Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Sambas pada khususnya. Pemerintah pusat bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Harapannya pembukaan PLBN ini bisa mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas karena arus mobilisasi barang dan jasa bisa keluar masuk dari kawasan perbatasan secara legal.

Kata Kunci: *PLBN, Border, Perbatasan dan Pembangunan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Negara adalah tempat yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk didalamnya tentang pengaturan dan aktivitas pembangunan dan ekonomi, transportasi, perdagangan, politik dan sebagainya. Sebuah tempat atau wilayah dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi tiga unsur utama yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan. Pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Selain itu negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta mensejahterakan warganya.

Bentuk sebuah negara tergantung dari beberapa aspek diantaranya adalah tujuan negara itu sendiri. Suatu negara pasti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dan tujuan tersebut berbeda pada setiap negara, begitu pula dengan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia tidak akan tercapai jika tidak didukung dengan sistem administrasi negara yang baik dan terstruktur. Walaupun sistem administrasi negara Indonesia ini merupakan tugas dari pemerintah, namun diperlukan pula dukungan dari masyarakat. Hal ini akan merangkul pandangan hidup rakyat mengenai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat.

Mencapai tujuan negara Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945, rakyat harus berusaha untuk mewujudkan wawasan nusantara yaitu sikap mengutamakan kesatuan wilayah Indonesia serta menghargai dan menghormati keragaman. Tujuan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Melalui pembukaan UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, pendidikan serta

mengupayakan perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, hal ini sesuai dengan program presiden Joko Widodo yang tertuang dalam nawacita melalui sebuah kabinet yang disebut kabinet kerja.

Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Istilah ini merujuk pada visi misi yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengenai agenda pemerintahannya. Dalam visi misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri di dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun inti dari program nawacita tersebut adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Trimatra tempat yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara Maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dengan memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 ha program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan dan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara profesional aspek pendidikan, serta pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembanguna telah diarahkan pada pembangunan daerah khususnya pada daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), sesuai isi nawacita pada poin empat. Pembangunan daerah dilakukan dengan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan.

Karakteristik daerah 3T pada dasarnya tidak terlepas dari ketertinggalan yang disebabkan oleh berbagai kondisi pada daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena perkembangan pembangunan yang tidak merata, cenderung disalurkan kepada perkotaan, kabupaten yang berkembang dan daerah industri. Begitupula dengan permasalahan yang di-

hadapi di Kabupaten Sambas. Kondisi daerah yang berbatasan langsung dengan perbatasan Sarawak-Malaysia, tentunya menjadi sorotan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dewasa ini wilayah perbatasan bukan hanya sekedar identitas suatu negara tetapi menjadi beranda depan wajah negara Indonesia

serta menyangkut permasalahan kedaulatan sebuah negara. Berikut adalah daerah yang termasuk kedalam daerah 2 T di Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)
Di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten
1.	Sambas
2.	Bengkayang
3.	Landak
4.	Ketapang
5.	Sintang
6.	Kapuas Hulu
7.	Melawi
8.	Kayong Utara

Pada Tabel di atas menunjukkan dari 14 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan ada 8 Kabupaten yang termasuk ke dalam daerah 3 T yaitu Kabupaten Sambas, Landak, Bengkayang, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi dan Kayong Utara. Selain daripada itu yang tidak termasuk dalam daerah 3T adalah Kota Pontianak dan Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sekadau dan Sanggau. Delapan Kabupaten yang termasuk dalam daerah 3 T penulis hanya membahas mengenai permasalahan perbatasan di Kabupaten Sambas.

Komitmen pemerintah tentunya sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Sambas. Untuk menjawab permasalahan tersebut sejalan dengan isi nawacita Presiden Joko Widodo, pembangunan perbatasan melalui dibukanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas disambut suka cita masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas dengan melakukan pembenahan pembangunan jalan

90 km dari pusat Kota Sambas menuju Aruk Sajingan Besar. Aruk yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Maret 2017 tentunya membuka peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Sambas. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, PLBN Terpadu Aruk yang telah beraktivitas dua tahun ini merupakan zona inti PLBN. Zona ini berada di atas lahan seluas 9,1 hektar dengan total luas pembangunan 7,619 meter persegi dengan biaya sebesar Rp 131 Milyar tahap I dan Rp 201 Milyar untuk tahap II sebagai fasilitas penunjang. Kepala Pos Imigrasi PLBN Aruk Daryanto menuturkan sejak PLBN dibangun justru banyak pelintas masuk Indonesia-Malaysia ada sekitar 700 orang yang keluar dari Malaysia masuk ke Indonesia.

TEORI KONSUMSI

Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda (barang dan jasa) dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Untuk dapat mengonsumsi, seseorang harus mempunyai

pendapatan, besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia (konsumen) memuaskan kebutuhannya dengan penggunaan barang dan jasa. Menurut Keynes, konsumsi berkaitan dengan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Secara otomatis, pendapatan akan mempengaruhi besar tabungannya (Sri Wahyuni, 2013 :75)

$$Y = C + S$$

$$C = a + By$$

S merupakan tabungan (*saving*), C menunjukkan konsumsi (*consumption*), dan Y menunjukkan pendapatan (*yield*). Sedangkan a adalah pengeluaran pada saat pemasukan sama dengan nol dan b menunjukkan indikator yang berhubungan dengan konsumsi dan pendapatan. Nilai b ini juga menyatakan kecenderungan konsumsi marginal.

Terdapat hubungan antara konsumsi saat ini dengan konsumsi mendatang. Hubungan ini dapat diilustrasikan melalui grafik berikut.

Gambar 1
Hubungan Konsumsi Sekarang dengan Konsumsi Akan Datang

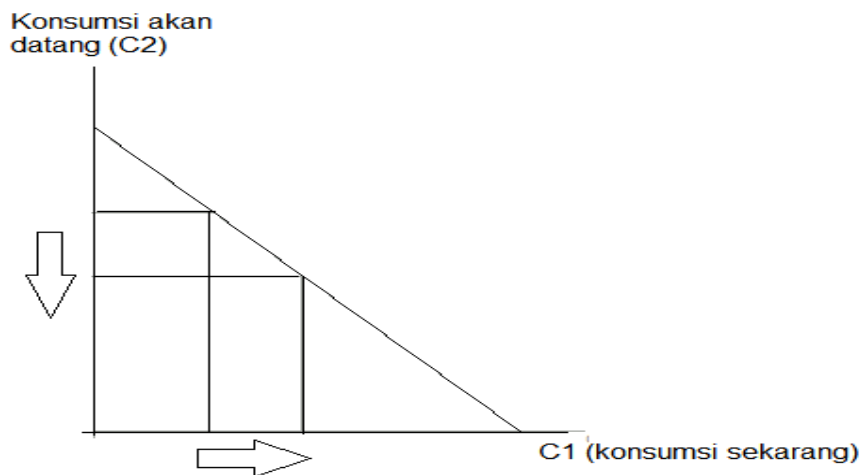


Diagram di atas menjelaskan bahwa tingkat konsumsi yang akan dilakukan di masa datang (C_2) sangat tergantung dari tingkat konsumsi yang dilakukan saat ini (C_1). Apabila saat ini konsumsi yang dilakukan lebih kecil daripada pendapatan, maka akan ada tabungan yang disimpan oleh konsumen sehingga konsumsi dan tabungan di masa datang akan lebih besar karena masih adanya sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan pada periode sebelumnya.

FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KONSUMSI

1. Faktor-faktor Ekonomi

- a. Pendapatan rumah tangga (*household income*).

Pendapatan rumah tangga besar pengaruhnya terhadap tingkat kon-

sumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, makin tinggi pula tingkat konsumsi. Saat tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi juga semakin besar. Kenaikan pendapatan juga juga mendorong pola hidup menjadi semakin konsumtif, setidak-tidaknya semakin menuntut kualitas konsumsi yang lebih baik.

- b. Kekayaan rumah tangga (*household wealth*).

Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (rumah, tanah dan mobil) dan finansial (deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga). Kekayaan-kekayaan tersebut dapat meningkatkan

konsumsi karena menambah pendapatan disposabel. Misalnya, bunga deposito yang diterima tiap bulan dan deviden yang diterima setiap tahun menambah pendapatan rumah tangga. Hal serupa dengan rumah, tanah dan mobil yang disewakan. Penghasilan-penghasilan tadi disebut sebagai penghasilan nonupah. Tambahan penghasilan tersebut digunakan untuk konsumsi sehingga meningkatkan pengeluaran konsumsi.

c. Jumlah Barang Konsumsi Tahan Lama

Pengeluaran konsumsi juga dipengaruhi oleh jumlah barang-barang konsumsi yang tahan lama (*consumers durables*). Pengaruh terhadap tingkat konsumsi bisa bersifat positif dan negatif. Barang-barang yang tahan lama biasanya harganya mahal. Jika membelinya secara tunai, maka sebelum membeli harus menabung (konsumsi berkurang). Namun apabila membelinya dengan cara kredit, maka masa untuk menghemat adalah sesudah pembelian barang.

d. Tingkat bunga (*interest rate*)

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi atau mengerem keinginan konsumsi, baik dilihat dari sisi keluarga yang memiliki kelebihan uang maupun yang kekurangan uang. Tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (*opportunity cost*) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi yang ingin mengonsumsi dengan berhutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan fasilitas kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda (mengurangi) konsumsi. Sama halnya dengan mereka yang memiliki banyak uang. Tingkat bunga yang tinggi menyimpan uang di bank terasa lebih menguntungkan ketimbang dihabiskan untuk konsumsi. Jika tingkat bunga rendah, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Bagi keluarga kaya, menyimpan uang di bank menyebab-

kan ongkos menunda konsumsi terasa lebih besar.

e. Perkiraan Masa Depan (*Household Expectation about the Future*).

Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya makin baik, mereka akan merasa lebih leluasa untuk melakukan konsumsi sehingga pengeluaran konsumsi cenderung meningkat. Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya makin jelek, mereka akan menekan pengeluaran konsumsi.

2. Faktor non Ekonomi

Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya tingkat konsumsi adalah faktor sosial-budaya masyarakat dan agama. Faktor budaya dapat menyebabkan berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika, dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Contoh paling konkret di Indonesia adalah berubahnya kebiasaan berbelanja dari pasar tradisional ke pasar swalayan. Begitu juga kebiasaan makan, dari makan masakan yang disediakan ibu di rumah menjadi kebiasaan makan di restoran atau pusat-pusat jajanan yang menyediakan makanan cepat saji (*fast food*). Demikian juga dengan rumah. Sekarang rumah bukan hanya sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan melainkan ekspresi dari keberadaan diri. Tidak mengherankan bila ada rumah tangga yang mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah hanya untuk membeli rumah idaman.

Faktor agama juga ikut andil terhadap tingkat konsumsi. Misal dalam agama Islam, musim haji akan berpengaruh pada kebutuhan akan pakaian ihram, sapi, bahan-bahan dapur, dan barang-barang konsumsi lainnya. Ini juga terjadi pada perayaan agama-agama lainnya seperti Kristen, Hindu dan Budha yang memiliki bentuk konsumsi masing-masing.

Banyak lagi contoh lain faktor-faktor non-ekonomi yang berpengaruh

terhadap tingkat konsumsi individu dan masyarakat umumnya. Selain sosial-budaya dan agama, faktor pendidikan, politik, juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

PEMBANGUNAN EKONOMI

Pengertian pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tumbuh, bertambah dan berkembang atau perkembangan pertumbuhan, bertambah dan semakin banyak, perihal pembangunan proses membangun mencapai kemajuan, perkembangan dan sebagainya. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat dari konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai “suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang”. Kemakmuran itu sendiri ditunjukkan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau GDP adanya keseimbangan antara *supply* dan *demand* di pasar. Pendapat Meier (Kuncoro, 1997;17) yaitu “Suatu kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah ‘garis kemiskinan absolut’ tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang” (Subandi, 2014: 9)

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi serta infrastruktur lebih banyak tersedia, permasalahan semakin banyak dan berkembang. Taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat, sebagai implikasi dan perkembangan diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendidikan

meningkat dan kemakmuran masyarakat akan tinggi (Sudono Sukirno, 2013: 3). Sedangkan ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah ekonomi di negara berkembang saja, dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Menurut istilah ekonomi, pembangunan diartikan sebagai berikut:

- a. Proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan terus menerus dilakukan oleh kelompok individu, bertujuan menciptakan perubahan mendasar, berkenaan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terbelakang, agar menjadi kelompok masyarakat ekonomi, sosial, ilmiah dan berbudaya baru. Seseorang bisa menikmati kehidupan lebih baik dari sebelumnya.
- b. Aktivitas suatu bangsa untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada agar dicapai kemajuan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.
- c. Proses perubahan pada kondisi yang lebih baik atau kemajuan secara terus menerus menuju perbaikan kondisi kehidupan manusia. (Halbawi.1989:13)

Berdasarkan arti dan definisi di atas, disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses yang berlangsung secara berkelanjutan terus-menerus, dilakukan sekelompok individu, bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam mencapai kehidupan bersifat kualitatif dan kuantitatif agar menjadi masyarakat bisa menikmati kehidupan lebih baik dari sebelumnya, dengan mengembangkan segala potensi dan sumberdaya yang tersedia secara maksimal.

Menurut Adam Smith yang dikenal dengan karyanya yang berjudul *an inquiry into the nature and case of the wealth of Nation* yang diterbitkan tahun 1776, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara. (Jhiagan, 2012 : 81)

Menurut H. F Williamson dan J. A Buntrick pembangunan ekonomi merupakan proses tempat suatu Negara menggunakan sumber-sumber produksinya sehingga mampu memperbesar produk per kapita. Sedangkan menurut Mexsist Ortodoks pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan sosial, seperti perubahan nilai, sikap dan pranata lama diganti oleh nilai dan sikap pranata baru, tanpa mempertimbangkan sejauh mana perubahan itu mencerminkan harapan sebagian besar rakyat yang bersangkutan.

Menurut Currey definisi pembangunan harus menunjukkan dengan pasti untuk siapa, untuk apa dan bagaimana, maka pembangunan itu hendaknya diartikan sebagai proses perubahan. (Kamarudin, 1985:35)

Dengan demikian pembangunan ekonomi sebagai suatu usaha perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan hasil produksi nasional secara umum merubah struktur ekonomi agraris menjadi ekonomi industri yang menjadikan bidang industri serta keahlian sebagai andalan dan menjadikan tingkat pertumbuhan riil produk nasional dan pendapatan perkapita sebagai indikator pokok bagi pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi juga sebagai kegiatan ekonomi secara berkelanjutan dan terus-menerus meliputi perubahan struktur yang berfungsi meningkatkan hasil produksi, menambah jumlah lapangan kerja, menyerap tenaga kerja baru, menciptakan perbaikan dalam kegiatan ekonomi kini dan yang akan datang. Diukur dalam bentuk pendapatan riil perkapita, yang berlangsung untuk masa yang cukup lama. Tujuannya adalah menjadikan penduduk lebih mampu untuk mencapai perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan.

Dengan demikian pembangunan ekonomi adalah tindakan pemerintah secara berkesinambungan dengan aktivitas keikutsertaan mayoritas menciptakan perubahan mendasar pada struktur ekonomi dan sosial yang paling lengkap serta mendayagunakan segala sumberdaya yang tersedia seefisien

mungkin, untuk meningkatkan produksi dan mendistribusikannya.

FAKTOR-FAKTOR PEMBANGUNAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya:

- a. Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembangunan.
- b. Jumlah penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pembangunan ekonomi, karena bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Sedangkan menurut Richardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk menjadi dua kali lipat dalam satu generasi, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini pekerja akan menerima upah sangat minimal, dan ini dapat menyebabkan tingkat perekonomian mencapai *stationary state* dan pembentukan modal sulit hingga pada akhirnya pengusaha sulit mendapatkan keuntungan.
- c. Faktor sumber daya alam, sebagian besar Negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan

- mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
- d. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
 - e. Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
 - f. Sumber daya modal, dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
 - g. Kebijakan pemerintah, dapat berupa kebijakan moneter, berpihak pada pergerakan sektor riil serta kemudahan dalam aktivitas bisnis akan memudahkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan dan sistem yang berkembang dan berlaku.

KAWASAN PERBATASAN

Kawasan perbatasan negara menurut UU 26/2007 dan PP 26/2008 adalah wilayah kabupaten/kota secara geografis serta demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Sedangkan menurut UU 43/2008, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi batas dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam

hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Sebagai cabang baru dari ekonomi regional, ekonomi perbatasan menggabungkan antara ekonomi geografi dan ilmu ekonomi untuk mempelajari proses pembangunan di kawasan perbatasan yang terdiri paling tidak 2 daerah dengan sistem politik dan kebijakan ekonomi yang berbeda. Alasan ekonomi perbatasan menjadi penting (Suratman, 2008: 33), antara lain:

- a. Kenyataan bahwa kawasan perbatasan terletak jauh dari pusat aktivitas ekonomi sehingga cenderung menjadi kawasan yang tertinggal.
- b. Adanya hambatan administrasi dalam lalu lintas antar barang dan orang sehingga kawasan perbatasan yang pada dasarnya homogen menjadi heterogen
- c. Berkaitan dengan tren globalisasi yang mendorong perekonomian menjadi tanpa batas

Tangkilisan (2013) mengatakan bahwa istilah perbatasan memiliki dua pengertian, yaitu *boundaries* dan *frontiers*. Konteks *boundaries*, perbatasan merupakan garis pemisah wilayah antarnegara. Adapun *frontier*, perbatasan lebih merujuk pada jalur (*zones*) yang membentang dan memisahkan dua wilayah negara. Lebih lanjut Tangkilisan (2013) menjelaskan bahwa garis perbatasan adalah bidang vertikal yang melalui permukaan tanah, lapisan bawah tanah dan udara serta membatasi kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Area di kanan dan kiri garis perbatasan disebut wilayah perbatasan. Secara morfologi, perbatasan terdiri (a) *fisiografi*, yakni unsur fisik alamiah berupa pegunungan, sungai, perairan atau daerah terbuka; (b) *anthropogeografi*, yakni pemisah berdasarkan entitas bahasa dan etnis; dan (3) *geometri*, yakni garis imajiner berupa garis bujur dan lintang.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Urgensi perbatasan suatu Negara tampak dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam dan

menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik dan hukum nasional dan internasional (Moeldoko, 2014).

Secara umum permasalahan terkait kawasan perbatasan mencakup tiga aspek berikut ini.

1. Aspek sosial ekonomi wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang). Hal itu disebabkan lokasi yang relatif terisolasi/ terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan; dan langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (*blank spots*).
2. Aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan merupakan teritorial yang luas dengan pola penyebaran penduduk tidak merata. Hal itu menyebabkan pengendalian oleh pemerintah sulit dilakukan. Selain itu, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan sinergis, mantap dan efisien.
3. Aspek sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi mengundang kerawanan, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Menurut Krisman Manurung (2011), strategi pembangunan kawasan perbatasan berfokus pada pertumbuhan ekonomi khususnya sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan konstruktif guna mendukung pelaksanaan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, meletakkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat di kawasan perbatasan secara nyata dan meningkatkan kinerja manajemen pembangunan melalui kualitas aparat pemerintah sehingga mampu men-

jadi fasilitator pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, maka perlu ditetapkan Otorita Kawasan Perbatasan (OKP) dan pintu masuk (*gate*) ke negara tetangga, yang secara khusus diatur tersendiri sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab visi pengembangan kawasan perbatasan Indonesia yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda negara dengan mempercepat pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah dan mengembangkan kerja sama ekonomi sub-regional yang dilakukan secara sinergis dan seimbang dengan perlindungan lingkungan dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan (*security*) dan pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) berbasis karakteristik lokal dengan melibatkan secara aktif pemerintah daerah.

Pada level internasional, permasalahan daerah perbatasan berupa kesenjangan prasarana dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan. Strategi pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan dengan tersedianya infrastruktur yang memadai.

Menurut Faizal Basri (2011), permasalahan yang dihadapi oleh daerah perbatasan pada level lokal berupa keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalannya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Sementara pada level nasional, permasalahan daerah perbatasan adalah berupa kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan serta masih kurangnya personi anggaran, prasarana dan sarana, serta kesejahteraan, akan dampak pada terjadinya perdagangan lintas batas ilegal, kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam negeri, terjadinya proses pemudaran (degradasi) wawasan kebangsaan, *illegal logging* dan *illegal fishing*

oleh negara tetangga, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan.

Kebijakan pembangunan daerah perbatasan dimaksudkan untuk mendorong kebijakan afirmatif tentang pembiayaan dan pengembangan fiskal daerah tertinggal, mendorong tata kelola sumber daya alam daerah tertinggal berbasis komoditas unggulan, mendorong dan meningkatkan kualitas SDM melalui program penguatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, serta proaktif melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder pembangunan daerah tertinggal.

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI PERBATASAN

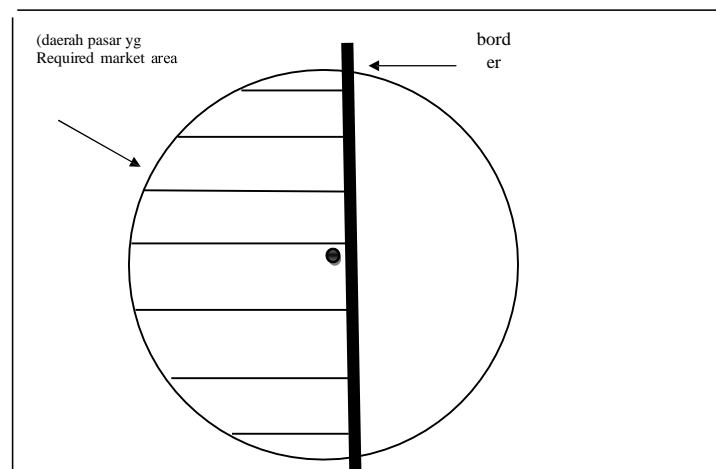
Perubahan paradigma perbatasan dari konsep *security* menuju konsep *prosperity* berimbang pada sisi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Interaksi yang terjadi mengakibatkan berkembangnya aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat di perbatasan. Penjelasan mengenai konsep-konsep dalam pertumbuhan ekonomi dan indikator terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan perspektif pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, secara teo-

ritis pertumbuhan ekonomi berimbang pada efek integrasi ekonomi yang diikuti oleh perubahan spasial atau penggunaan lahan. Kondisi tersebut terjadi dengan syarat adanya iklim yang sesuai antara model ekonomi, dampak keruangan dan kebijakan untuk menunjang hal tersebut. Model lokasi tradisional dan model baru geografi ekonomi mengindikasikan bahwa perdagangan eksternal dapat mengubah pola spasial penggunaan lahan di wilayah perbatasan (Niebuhr & Stiller, 2001).

Berkembangnya aktivitas ekonomi di perbatasan tidak terlepas dari potensi pasar yang dimilikinya. Dengan meninjau model lokasi dan pertimbangan area pemasaran pada sebuah wilayah, wilayah perbatasan dapat saja dipandang sebagai sebuah area yang kurang menguntungkan bagi berkembangnya potensi pasar. Pertimbangan tersebut didasarkan pada beberapa rintangan yang biasanya terjadi (tarif, kebijakan dan hambatan lain) pada wilayah perbatasan yang menyebabkan potensi tumbuhnya perekonomian tidak terjadi secara optimal karena area jangkauan pemasaran yang berkurang (Niebuhr & Stiller, 2001). Lebih jelas kondisi tersebut ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2
Distorsi Area Pasar Akibat Adanya Berbagai Rintangan Di Wilayah Perbatasan oleh Niebuhr & Stiller, 2001



Berkaitan dengan perkembangan wilayah, menurut Branch (1998) terdapat be-

berapa faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah antara lain bentuk fisik (guna lahan dan struktur ruang), fungsi wilayah

(fungsi ekonomi, perdagangan dan industri) yang dipengaruhi aktivitas penduduk, sifat masyarakat (kultur dan kepercayaan, sosial dan gaya hidup), ketersediaan unsur umum (jaringan jalan, air bersih, dan lain-lain). Beberapa faktor tersebut berperan penting dalam perkembangan wilayah perbatasan. Tumbuhnya aktivitas ekonomi dapat dicirikan dengan terjadinya perubahan pada aspek spasial, sosial dan infrastruktur yang berkembang.

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Pertumbuhan secara umum adalah suatu ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Menurut Simon Kuznets dalam Todaro (2008), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Lebih lanjut Simon Kuznets dalam Todaro (2008), menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah barang modal, teknologi, tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen, kewirausahaan (*entrepreneurship*), informasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu wilayah. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk.

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN

Pembangunan ekonomi dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan diarahkan agar pembangunan yang berlangsung merupakan kesatuan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional perlu adanya pembangunan ekonomi daerah yang pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan

antar daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata antar daerah.

Salah satu upaya untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, maka diperlukan suatu kawasan andalan yang berorientasi untuk mengembangkan potensi daerah. Menurut Royat (1996) dalam Kuncoro (2000), kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah, yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi atau kabupaten, memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.

Dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah diperlukan teori dasar sebagai rujukan dan acuan pengembangan wilayah. North (1990), mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang tergantung pada kegiatan industri ekspornya. Teori *export base* dimunculkan pertama sebagai dasar aktivitas ekonomi berkaitan dengan pengembangan wilayah kawasan. Teori ini menjelaskan bahwa tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah merupakan fungsi dari tumbuh dan berkembangnya aktivitas *export base* (basis ekspor). Artinya aktivitas ekonomi suatu wilayah lahir dari aktivitas ekonomi dasar (*export base*) dan aktivitas ekonomi penunjang (*service*).

Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena sektor tersebut menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumber daya yang unik, lokasi pemasaran yang unik dan tipe keuntungan transportasi. Menurut North (1990), kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah tersebut. Permintaan eksternal mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam menghasilkan komoditi ekspor. Dasar dari yang paling penting dari teori lokasi adalah meminimalisir ongkos (transport) dan memaksimalkan keuntungan (*profit*). Prinsip *esport base* adalah; 1) suatu wilayah akan maju dan berkembang maka wilayah tersebut akan berorientasi pada ekspor

atau permintaan dari luar (adanya sektor basis), 2) adanya sektor non basis maka akan ada *effect multiplier*.

Pengembangan ekonomi kawasan adalah kawasan yang dalam pengembangannya memiliki sumber daya produktif, posisi strategis dan berimplikasi pada pengembangan ekonomi wilayah (Sun'an, dan Senuk, 2015). Kawasan dalam konsep ini adalah ruang yang mempunyai entitas geografis yang terintegrasi dimana tidak ditentukan oleh basis administrasi dan dibagi dalam beberapa fungsi daerah. Artinya pertumbuhan ekonomi potensial yang memiliki akselerasi pertumbuhan yang berbeda dan dapat dikembangkan secara efektif.

Kebijakan merupakan dimensi yang sangat penting, mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan, sedangkan apa yang hendak dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan, atau aspirasi tertentu. Apabila kebijakan diputuskan tanpa ada masalah, kebutuhan atau aspirasi yang nyata dan tentu saja tidak bisa didasarkan pada masalah atau kebutuhan yang dikarang pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Mengingat kebijakan bagian dari kepentingan publik maka yang menjadi perhatian adalah masalah kebutuhan dan aspirasi publik. Oleh karena kebijakan yang diambil menjadi sebuah solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu dirumuskan suatu strategi dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Kartasamita (1996), mengemukakan ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. Pertama, upaya ini harus terarah (*targeted*), hal ini secara populer disebut pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, prosedur ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai beberapa tujuan yakni agar ban-

tuhan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggungjawabkan upaya diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pengembangan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar atau daerah dibelakangnya (*hinterland*) melalui pembudayaan sektor atau subsektor basis sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah (Kuncoro, 2008). Tujuan utama pengembangan ekonomi kawasan andalan dalam kerangka mempercepat pembangunan wilayah kawasan dengan mengarahkan semua potensi secara maksimal.

Menurut Sun'an dan Senuk (2015), bahwa faktor penting dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah karena memiliki keunggulan sebagai berikut;

1. Lokasi Geografis (posisi strategis)
Merupakan pendekatan atau orientasi terhadap lokasi kawasan melalui pasar domestik dan internasional. Hasil produksi masyarakat selain digunakan untuk konsumsi juga dijual dapat meminimalisir biaya transportasi.
2. Sumber Daya
Proses optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial dalam menentukan lokasi pengembangan ekonomi kawasan.
3. Ketersediaan Infrastruktur
Infrastruktur memiliki posisi strategis dalam mendorong sektor produksi, pasar domestik dan pasar internasional.
4. Keterkaitan antar-Regional
Percepatan pengembangan ekonomi diperlukan keterkaitan antar-regional dalam kawasan tersebut. Pada posisi ini *Trickle down effect* (efek menetes ke bawah) dimungkinkan dapat terjadi.

Strategi pengembangan selain melibatkan karakteristik di atas, juga terkait dengan penilaian terhadap fleksibilitas perencanaan jangka pendek dan menengah (investasi), efisiensi biaya, adaptasi global terhadap kondisi internal, kompetisi dan kolaborasi. Beberapa konsepsi strategi tersebut sangat terkait dengan strategi pengembangan wilayah perbatasan yang akan diformulasikan, hal ini melihat konteks wilayah perbatasan sebagai kawasan khusus yang memiliki keunikan dalam integrasinya secara global (antar negara).

Perlu satu kebijakan strategis yang harus dijalankan mengingat banyak faktor yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap produk akhir sebuah kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan kebijakan tersebut adalah faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan, sosial-politik serta para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan, dan faktor internal seperti masalah kelembagaan, sumber daya manusia.

Keuntungan dalam pengelolaan sebuah strategi yang tepat dalam fungsinya untuk mencapai tujuan pengembangan adalah adanya kerangka kerja yang efektif, adanya fungsi koordinasi, penentuan terhadap prioritas, integrasi pelaku atau stakeholder dalam mencapai tujuan. Berbagai keuntungan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam formulasi strategi yang tepat, terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERDAGANGAN LINTAS BATAS

Perdagangan lintas batas adalah kegiatan ekspor-impor antara dua daerah atau wilayah di perbatasan negara yang berbeda. Keberadaannya dijamin dengan peraturan yang berlaku, serta memiliki kaidah-kaidah tertentu yang harus ditaati oleh pelaku ekonomi tersebut, baik perorangan maupun kelompok usaha berbadan hukum. Perdagangan telah memberi kontribusi besar pada perekonomian nasional melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, menambah devisa negara, namun harus dikelola secara profesional agar tidak mem-

beri dampak negatif, karena itu dibutuhkan perhatian dari pemerintah. Menurut Iswara (2014), campur tangan pemerintah dalam arus bebas perdagangan diperlukan dengan alasan budaya, politik dan ekonomi. Motif campur tangan pemerintah di dalam arus bebas perdagangan adalah sebagai berikut:

1. **Motif Budaya**
Negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umum adalah untuk melindungi identitas nasional sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional karena kekuatan global.
2. **Motif Politik**
Mencakup melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain dan mendapatkan pengaruh atas negara lain.
3. **Motif Ekonomi**
Melindungi industri-industri baru dari persaingan dan mendorong kebijakan perdagangan strategis. Kebijakan Pas Lintas Batas dievaluasi berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh Widodo (2005), yaitu sebagai berikut;
 - a. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program serta kegiatan
 - b. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator perencanaan tujuan
 - c. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program
 - d. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan datanya dilapangan
 - e. Hasil data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan pengolahan dan dikomporasi dengan kriteria pencapaian tujuan

Tujuan kebijakan Pas Lintas Batas adalah masyarakat perbatasan dapat melakukan lintas batas negara dengan mudah tanpa harus menggunakan paspor. Tujuan ini berdasarkan adanya masalah yang mana penduduk harus menggunakan paspor ketika pergi ke negara lain. Khusus penduduk perbatasan

aturan tersebut agak berlebihan, mengingat interaksi antara penduduk di wilayah perbatasan sangat tinggi serta hubungan sosial budaya yang erat terjalin antara penduduk perbatasan.

Menurut Tjokroamidjojo (1995), peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan, sebagai *service state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial terhadap keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat, peran *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur sebagai pembaharuan.

KONDISI KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN SAMBAS

Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km. Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang ini adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya wilayah Kabupaten Sambas sejak tahun 1960

adalah meliputi juga Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sekarang dimana pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas.

Dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Sambas terletak diantara 1°23" LU dan 108°39" BT, dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara dengan Laut Natuna dan Serawak (Malaysia Timur)
2. Sebelah Selatan dengan Kota Singkawang & Kabupaten Bengkayang
3. Sebelah Barat dengan Laut Natuna
4. Sebelah Timur dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Bengkayang.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan dan 183 Desa, yaitu Kecamatan Selakau (8 Desa), Pemangkat (5 Desa), Jawai (11 Desa), Tebas (23 Desa), Sambas (18 Desa), Teluk Keramat (24 Desa), Paloh (8 Desa), Sejangkung (12 Desa), Sajingan Besar (5 Desa), Galing (10 Desa), Subah (12 Desa), Tekarang (7 Desa), Semparuk (5 Desa), Sajad (4 Desa), Sebawi (7 Desa), Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tangaran (7 desa), Selakau Timur (5 desa) dan Salatiga (5 desa). Dari 19 Kecamatan tersebut terdapat 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Serawak) yaitu Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar.

Tabel 1.2
Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan
Kabupaten Sambas –Serawak Malaysia
Tahun 2013

Kabupaten	Kecamatan	Jml Desa	Luas (km ²)	Ibu kota
Sambas	Paloh	7	1.148,48	Liku
	Sajingan Besar	5	1.404,94	Sajingan

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014

Wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia meliputi 12 desa yang mencakup ke dalam

2 Kecamatan yaitu Kecamatan Paloh (Desa Sabubus, Desa Nibung, Desa Malek, Desa Tanah Hitam, Desa Matang Danau, Desa

Kalimantan dan Desa Temajok) dengan luas 1.148,48 km² dan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Sei, Bening, Desa Santaban, Desa Senatab, Desa Sebunga dan Desa Kallau) seluas 1.404,94 km. Sehingga total luas kawasan perbatasan Paloh-Sajingan Besar (PALSA) adalah 2.553,42 km

Secara geografi, kawasan perbatasan ini terletak pada 1927'46.35' sampai 2902'33.90' LU 190'28'27,90 sampai 109'45'41.84" BT. Batasan kawasan perbatasan ini merupakan kombinasi batas alam seperti sungai, gunung, bukit dan batas administrasi yang telah ada yaitu batas kecamatan dan batas desa. Batas kawasan dengan wilayah Serawak memanjang dari Tanjung Datu Paloh hingga Puncak Gunung Rasau di Sajingan Besar sepanjang 97 km, sedangkan batas memanjang muara Sungai Limau Manis (Paloh) hingga pertemuan Sungai Puteh dan Sungai Air Hitam yang terletak di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar.

PELUANG DAN TANTANGAN

Kecamatan Sajingan Besar merupakan pintu gerbang batas internasional dan pusat pengembangan perbatasan atau *Border Development Center* di Kabupaten Sambas. BDC dibangun di Kecamatan Sajingan Besar sebagai kebijakan nasional yang hampir sama dengan pintu gerbang internasional di Entikong. Letak BDC sekitar 7 km dari kantor Kecamatan Sajingan Besar dan sekitar 87 km dari ibukota Kabupaten Sambas serta dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Mata pencaharian masyarakat Sajingan didominasi oleh bidang pertanian baik tanaman konsumsi seperti sayur, rempah dan buah-buahan dan tanaman produksi seperti karet dan jati. Dari hasil alam tersebut, masyarakat Sajingan lebih tertarik menjual hasil bumi mereka ke Malaysia, hal ini dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh bila harus dipasarkan di Sambas, hal inilah yang menyebabkan masyarakat Sajingan sangat jarang menjual hasil bumi ke ibu kota kabupaten.

Dengan dibukanya BDC, aktivitas ekonomi antar pedagang dari kedua negara mendapat pengaruh yang relatif signifikan. Di sepanjang zona bebas (500 m dari titik 0 km dari batas masing-masing negara), para pedagang dari kedua negara melakukan transaksi sejak pagi hingga tengah hari. Hal tersebut dikarenakan para pedagang dari Malaysia harus segera mendistribusikan dagangannya ke pasar-pasar yang ada di negaranya. Selain ekonomi, dibukanya BDC turut berimplikasi pada kebijakan secara administratif bagi warga Indonesia yang hendak ke Malaysia ataupun sebaliknya.

PLBN Aruk dapat menjadi titik pertumbuhan ekonomi, menjadi fasilitas ekspor barang lokal ke Malaysia yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi perbatasan. Masyarakat juga harus siap dari berbagai sektor, paling tidak ada empat hal yang dilakukan agar masyarakat dapat bersaing dengan peluang, yaitu pendidikan non formal, pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan budaya lokal serta pemahaman mengenai hukum positif yang berlaku secara nasional. Pemkab Sambas juga harus membuka pasar rakyat agar masyarakat dengan mudah memasarkan hasil lokal. Melalui pasar rakyat bisa membangun sentral ekonomi di wilayah perbatasan sehingga memberikan peluang usaha warga setempat dan membuka lapangan pekerjaan. Apalagi mengingat kita sudah berada pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dihadapkan pada dua isu strategis, yaitu isu pengelolaan batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan. Bagi daerah Kabupaten Sambas isu ini dapat dilihat dari dua sisi yakni Kabupaten Sambas sebagai daerah lintasan dan daerah tujuan. Dengan dibukanya PLBN Aruk merupakan peluang bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Sambas.

Berdasarkan data dari PLBN Aruk dan Badan Pengelolaan Perbatasan jumlah

arus masuk warga negara asing cukup tinggi pada tahun 2019, yakni sebesar 6.670 orang. Hal ini merupakan potensi besar yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah

Daerah Kabupaten Sambas dalam rangka peningkatan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia pada sektor perdagangan.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Arus Pelintasan Batas Orang
Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk
Tahun 2019

No	Tgl Per Akhir Bulan	PASPOR			
		WNI		WNA	
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
1.	31 Janu 2019	7.270	6.975	729	716
2.	28 Feb 2019	6.896	7.433	1.512	1.840
3.	31 Maret 2019	6.787	7.147	551	960
4.	30 April 2019	6.549	7.693	705	762
5.	31 Mei 2019	5.783	19.736	553	919
6.	31 Juni 2019	6.305	7.427	1.689	1.473
	Jumlah	39.590	56.411	5.739	6.676

Sumber: Bag. Pengelolaan Perbatasan Setda Sambas, PLBN Aruk Tahun 2019

Pembukaan Border Aruk tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat khususnya dan Kabupaten Sambas pada umumnya. Peluang sekaligus tantangan, tantangan tersebut di-

dapat dari adanya kriminalitas di daerah perbatasan. berikut data kejahatan lintas batas negara tahun 2016-2018 dari Polisi Resort Kabupaten Sambas

Tabel 1.4
Tabel kejahatan lintas negara
Tahun 2016-2018

No	Jenis Kejahatan	2016	2017	2018
1.	Narkotika	1	-	1
2.	<i>Trafickin in person</i>	2	-	1
3.	Karantina	1	1	3
4.	Perlindungan konsumen	8	7	4
5.	Kepabeanan	2	-	-
	Jumlah	14	8	9

Sumber: Data Polres Sambas Tahun 2018

Berdasarkan data di atas disimpulkan tindak kejahatan pada tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2017 dan 2018, adapun kejahatan yang banyak terjadi adalah pada tindak kejahatan Perlindungan Konsumen sebanyak 8 kasus sedangkan yang terendah tercatat pada kasus Narkotika sebanyak 1 kasus pada tahun 2016 dan tahun 2018.

Artinya dibalik banyaknya kemungkinan peluang yang didapat, kita juga harus siap dengan kemungkinan terburuk dengan adanya pembukaan Border-Aruk, tentunya ini harus adanya kerjasama dari berbagai pihak bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum saja, tetapi peran masyarakat juga sangat diperlukan agar dapat menekan angka kriminalitas di daerah perbatasan.

SARAN

Bentuk dukungan dari adanya peluang dan tantangan dibukanya border Aruk, selain pembangunan infrastruktur yang tak kalah penting juga pembangunan mutu sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi seperti

keberadaan perguruan tinggi IAIS Sambas, POLTESA dan STIKES dapat membantu meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Sambas. Selain itu pengembangan sektor wisata juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2014. *Sambas dalam Angka*. Pontianak, Badan Pusat Statistik
- Equator.2017. *PLBN Aruk Termeah di Kalbar*. <https://equator.co.id/plbn-aruk-termewah-dikalbar/> . 20 Juli 2019
- Faizal Basri. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Internasional*. Surakarta:
- Ginanjdar Kartasasmitha dkk. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Seketaris Negara
- Halbawi, 1989. *Yusuf wa'abd Kharabsyah, Nahwu mafbum afdhal al-Tamiyyah al-Hadisah*, Beirut: Muasassah al-Raisalah.
- Indonesia Student. 2017. *Pengertian Daerah 3 T dan Permasalahannya*. www.indonesiastudents.com. 31 Oktober 2018
- Jhiagan. M.L.2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- .2018. *Daftar Daerah 3 T di Indonesia Terbaru dan Terlengkap*. www.faktadaerah.com. 30 Oktober 2018
- Kamaruddin.1985. *Pengantar untuk Memahami Pembangunan*, Bandung: Angkasa.
- Kompas.com. 2014. *Nawacita 9 Agenda Priotitas Jokowi-JK*. <http://nasional.kompas.com/read/>. 30 Oktober 2018
- Moeldoko, 2014. "Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia" dalam Makalah Seminar "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ketahanan Nasional". Universitas Tanjungpura Pontianak, tanggal 8 Mei 2014. Tidak dipublikasikan.
- Micheal P. Todaro.2008. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. Surabaya: Erlangga
- Mudjarat Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMPYKPN
- Subandi. 2014. *Ekonomi Pembanunan*. Bandun: Alfabeta

Suratman, Eddy. 2008. *Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah*. Pontianak: UNTAN Press

Sudono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana

Sri Wahyuni, 2013 *Teori Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Akuntabel; volume 10

Tangkilisan, Yuda B. 2013. “Indonesia dan Masalah Perbatasan: Beberapa Masalah dalam Perkembangan Daerah Tapal Batas sebagai Bagian Perekonomian Nasional dari Perspektif Sejarah” dalam *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*. No.1. Vol.1.Edisi Maret 2013.

Tri Widodo. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/160-oktober-2011/1229-strategi-pembangunan-kawasan-perbatasan.html.

Yuniarti, Desi. 2018. *Sosial Ekonomi Perbatasan*. Pontianak: CV Razaka Pustaka